

Analisis Penerapan Pendekatan Bottom Up Planning Pada Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Pangkajene Kacamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap

Sakaruddin Mandjarreki

Pengembangan Masyarakat Islam UIN Alauddin Makassar

E-mail:

mandjarreki@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada analisis penjelasan mengenai pendekatan bottom up planning dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari perspektif pemberdayaan masyarakat. Sebagai sebuah konsep dan gerakan, pemberdayaan masyarakat telah menjadi narasi yang populer, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan masyarakat yang berbasis pada perencanaan dari bawah (bottom up planning). Salah satu program utama nasional yang pelaksanaannya mengadopsi pendekatan ini adalah Program KOTAKU. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian ini meliputi; fasilitator, Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Kepala Desa, dan beberapa warga yang menjadi penerima manfaat utama program yang dipilih secara purposive sampling. Sumber data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, dan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran referensi yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan bottom up planning dijabarkan dalam implementasi program dalam beberapa variabel, yaitu; prinsip dasar program, masyarakat sebagai subjek aktif pembangunan, kewenangan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan isu gender yang melibatkan perempuan dalam program.

Kata kunci: Pemberdayaan, Kota Tanpa Permukiman Kumuh

Abstrack: This research focuses on analyzing the explanation of the bottom up planning approach to the implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) from the perspective of community empowerment. As a concept and movement, community empowerment has become a popular narrative, especially in relation to community development planning based on bottom up planning. One of the main national programs whose implementation adopts this approach is the KOTAKU Program. This research has descriptive-qualitative characteristics using a phenomenological approach. Informants for this research include; facilitator, Coordinator of Community Self-Reliance Institutions (LKM), Village Head, and a number of residents who are primary beneficiaries of the program selected by purposive sampling. Research data sources include primary data obtained through in-depth interviews, and secondary data obtained by searching for relevant references. Data was collected using observation, interviews and documentation methods. Data analysis techniques are carried out by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the bottom up planning approach is explained in program implementation in terms of a number of variables, namely; basic principles of the program, the community as an active subject of development, community authority in decision making, and gender issues involving women in the program.

Keywords: Empowerment, City Without Slums

A. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan dan kerentanan adalah masalah sosial yang serius dan menentukan kualitas sebuah negara. Masalah ini merupakan salah satu masalah paling klasik dan elementar bagi banyak negara di dunia. Tak pelak, banyak formula yang diresepkan oleh sejumlah teori dan kebijakan untuk mengurainya agar sebuah negara dapat lebih cepat berkembang. Kemiskinan dalam banyak dimensinya merupakan patologi sosial yang memiliki karakter distortif oleh karena dampak yang ditimbulkannya seringkali melingkupi berbagai spektrum kehidupan sosial dalam skala luas.

Sejak periode paradigma pembangunan terdahulu dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pijakan pokok penterjemahan pembangunan di tanah air, dan pada paradigma baru pembangunan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai acuan dasar pelaksanaan pembangunan, persoalan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai upaya penanggulangan kemiskinan tetap diposisikan sebagai isu pokok dan strategis. Dengan dasar itu pula, maka disusun berbagai program pemberdayaan dengan tujuan untuk mengurangi populasi penduduk miskin secara berkesinambungan dan konsisten melalui pembangunan partisipatif (Kartasmita, 1996) dan Sadan (1997). Konsep pembangunan partisipatif adalah suatu gejala baru yang hadir di akhir abad ke-20 sebagai jawaban atas lambannya pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang yang mengacu pada teori-teori modernisasi dan pertumbuhan ekonomi (Chambers, 1987).

Dalam pembangunan yang bercorak partisipatif, masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik melalui proses demokratisasi yang kuat maupun melalui pengembangan mekanisme partisipatif seperti konsultasi publik, dialog, dan forum yang melibatkan semua pemangku kepentingan

(Bahua, 2018). Dalam konteks ini, John (1980), Ife (2008), dan Mardikanto & Soebiato (2020) dan menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang partisipatif harus mampu mencakup pengembangan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam ekonomi lokal mereka. Ini meniscayakan penguatan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengelola usaha ekonomi, mengembangkan inisiatif kewirausahaan, dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini digunakan karena sumber masalah kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan masyarakat secara konkrit (Soetomo, 2011). Selaras dengan itu, Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996), dan demikian pula Friedman (1992) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pemberian mandat dan otoritas kepada masyarakat untuk berproses secara mandiri guna merencanakan masa depannya.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi sejak tahun 2016 hingga saat ini. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya. Keseluruhan proses program ini didasarkan pada paradigma pemberdayaan dengan meniscayakan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Implementasi program KOTAKU didasarkan pada prinsip demokrasi sebagai konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan, yakni dari “membangun masyarakat” (top down planning) menjadi “masyarakat membangun” (bottom up planning). Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada semua

orde pembangunan sesungguhnya berorientasi pada pemberian otonomi kepada masyarakat untuk berperan seluas-luasnya dalam pembangunan di wilayahnya. Pendekatan ini menjamin termanifestasikannya prinsip-prinsip demokrasi melalui pemberian masyarakat akses berpartisipasi dan pengambilan keputusan yang berhubung kait dengan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan program ini telah membawa manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya pada penguatan demokrasi dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman masyarakat. Di tingkat masyarakat, program ini telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas permukiman warga dengan mengatasi kekumuhan lingkungan. Semua kegiatan pembangunan infrastruktur diorientasikan untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rangka mendorong perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan di masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis bagaimana esensi paradigma pemberdayaan masyarakat menafasi Program KOTAKU dan kendalanya selama proses implementasi, digunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Secara metodologis, pendekatan studi kasus dimaksudkan untuk mengungkap fakta-fakta otentik yang terkait pelaksanaan program KOTAKU. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni data primer dan data sekunder.

Secara aplikatif, Bogdan dan Taylor (1992) memberi arahan bagaimana penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi dilakukan, yakni dengan melalui 3 (tiga) tahap, antara lain; (1) tahap pra lapangan. (2) tahap di lapangan, dan (3) tahap analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah menyangkut proses penyusunan secara sistematis data yang

diperoleh dari wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola hingga membuat kesimpulan (Moleong, 1989).

C. HASIL PENELITIAN

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program pemberdayaan masyarakat yang mengadopsi paradigma pembangunan mutakhir sebagai konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan global, yakni dari paradigma pembangunan ekonomi ke paradigma pembangunan manusia yang berkelanjutan. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah berjalan hampir satu dekade dengan hasil yang menggembirakan. Implementasi program ini di Kelurahan Pangkajene diselenggarakan dengan berlandaskan pada paradigma pemberdayaan dengan pendekatan bottom up planning. Pendekatan ini menegaskan bahwa masyarakat mendapatkan otoritas dan mandat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kepentingannya secara partisipatif, akurat dan presisif.

Pendekatan bottom up planning pada implementasi Program KOTAKU secara eksplanatif dideskripsikan sebagai berikut:

a. Prinsip Dasar Program

Beberapa prinsip dasar sebagai landasan dalam penyelenggaraan program KOTAKU adalah transparansi, inklusif, dan partisipatif. Prinsip transparansi ditegaskan melalui proses sosialisasi dan diseminasi program secara menyeluruh, intensif, dan berulang-ulang. Keseluruhan informasi tentang program (substansi, teknis, dan pendanaan) diberikan kepada masyarakat sebagai pemanfaat primer program melalui berbagai saluran informasi yang ada, baik melalui media cetak maupun dengan menggunakan platform media sosial.

Transparansi dibangun dalam upaya untuk mendapatkan dukungan konkret dan massif dari masyarakat agar program dapat berjalan secara baik dan akseleratif. Salah satu hal penting dan cukup sensitif yang dituntut banyak pihak untuk ditransparansikan adalah nominal dana yang digunakan dan pemanfaatannya di masyarakat. Sejauh ini, penelitian mengungkapkan bahwa transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran Program KOTAKU memiliki mekanisme yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi perihal anggaran.

Mekanisme tersebut terdiri dari 3 (tiga) langkah konkret, yakni, Pertama; penyebaran informasi pengelolaan dan pemanfaatan anggaran ke semua warga melalui papan informasi yang dipasang pada sejumlah titik strategis. Penyebaran informasi perihal pengelolaan dan pemanfaatan anggaran program dimaksudkan agar masyarakat dapat memerankan fungsi kontrolnya untuk meminimalisir potensi penyimpangan keuangan. Informasi anggaran untuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas diperuntukkan untuk semua lini masyarakat sambil memberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan jika sekiranya ada informasi yang perlu penjelasan lebih lanjut. Untuk up to date-nya informasi, maka muatan informasi senantiasa diperbaharui setiap 2 hingga 3 bulan sekali.

Kedua, pencatatan seluruh transaksi dan lalu lintas keuangan secara berlapis melalui pembukuan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berperan sebagai panitia kerja kegiatan. Transaksi semua keuangan yang keluar dari kas panitia atau KSM dicatat secara periodik, rapi dan dengan melampirkan bukti yang sah berupa kuitansi dan nota-nota transaksi. Proses pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara berlapis untuk menjamin keamanan dan kepercayaan publik terhadap integritas pengelola program.

Ketiga, pelaksanaan audit keuangan program dari lembaga auditor keuangan bonafid yang mendapatkan rekomendasi dari konsultan pelaksana program. Audit keuangan dilakukan setiap tahunnya di periode desember oleh auditor independen yang ditunjuk oleh executing agency program yang didasarkan pada reputasi lembaga auditor. Informasi yang dihimpun dalam wawancara dengan Koordinator Kota Program KOTAKU menjelaskan bahwa proses audit independen berlangsung selama 3-4 hari karena banyaknya tahapan proses audit. Audit dilakukan di sekretariat Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan pemaparan hasil audit dilakukan di Kantor Koordinator Kota KOTAKU Kabupaten Gowa.

Ketiga langkah ini dipandang sebagai mekanisme kontrol yang memberikan jaminan untuk menghindari penyimpangan penggunaan anggaran program. Pola ini tentu saja sejalan dengan substansi paradigma pemberdayaan, yakni tentang nilai dan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu keunggulan Program KOTAKU adalah berjalannya mekanisme kontrol yang diperankan oleh masyarakat secara luas dengan memberikan akses dan kesempatan untuk mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan anggaran program. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, puncak partisipasi adalah tatkala masyarakat mampu menjalankan fungsi kontrolnya atas dinamika pembangunan yang sedang berlangsung di tengah-tengah mereka. Fungsi kontrol tersebut dapat termanifestasikan jika sistem yang dibangun program menerapkan pola check and balance dan pola-pola partisipatif lainnya. Transparansi dan akuntabilitas merupakan upaya yang patut mendapatkan apresiasi yang tulus karena dalam banyak kasus, transparansi bersaing dengan hak privasi (Bambauer, 2017 dalam Kampeneer (2021)). Transparansi dalam perspektif Kampeneer tadi adalah kerelaan dan keluhuran individu dan juga sistemnya untuk

membuka diri secara totalitas guna menghindari prasangka dan tuduhan penyembunyian penyimpangan yang disengaja.

Prinsip inklusif didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat harus mendapatkan akses yang setara dan meluas untuk dapat mengambil bagian sekaligus menjadi bagian penting dalam keseluruhan tahapan program. Prinsip inklusif dibangun di atas kesadaran dan pemahaman bahwa program diorientasikan “untuk semua” bukan untuk golongan warga saja. Inklusi dapat mencegah determinasi sekelompok orang terhadap masyarakat secara keseluruhannya serta mencegah dari kemungkinan munculnya elit-elit baru. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip inklusi terejawantah secara baik dimana program sangat membuka diri dari keterlibatan semua pihak dengan tanpa membedakan warga berdasarkan profesi dan kelas sosialnya.

Secara sosiologis, inklusi memiliki kekuatan integratif dan memelihara harmoni di tengah arena multikulturasi suatu masyarakat. Inklusi menyatukan dan merekatkan perbedaan dalam masyarakat sehingga masyarakat akan jauh lebih efektif dalam mendorong dirinya berkembang secara optimal tanpa diganggu oleh friksi maupun konflik sosial antarindividu dan antargolongan dalam masyarakat. Dengan demikian, maka pemberdayaan masyarakat memiliki ruang yang lebih terbuka dalam mengintrodukir nilai-nilai kesetaraan, keterbukaan, dan kesetaraan di tengah pluralitas.

Sementara prinsip partisipatif didasarkan pada pentingnya mendorong partisipasi warga masyarakat untuk terlibat dan mengambil peran secara kualitatif dan signifikan dalam program, mulai dari fase perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil hingga fase terminasi. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menentukan pembangunan berkelanjutan (D. Ghai, dan J.M. Vivian, 2014). Partisipasi masyarakat

yang cukup signifikan juga ditunjukkan Fatimah (2022) dalam penelitiannya tentang desa wisata di Kabupaten Maros, dimana masyarakat menjadi motor penggerak dan penentu keberhasilan pengelolaan desa wisata tersebut.

Partisipasi yang tinggi tidak saja sebagai bentuk ekspresi masyarakat atas dukungannya terhadap program, tetapi lebih dari itu, partisipasi yang tinggi dapat menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) warga terhadap hasil-hasil pembangunan yang difasilitasi oleh program. Dalam berbagai kesempatan wawancara mendalam terhadap pelaku program menyangkut partisipasi, diperoleh informasi yang cukup bahwa partisipasi yang ditunjukkan warga sesungguhnya berasal dari kesadaran individu dan kolektif warga untuk mau secara sukarela berkontribusi dan mengambil peran dalam proses-proses penyelenggaraan program. Tidak ditemukan bentuk partisipasi yang lebih berciri mobilisasi, tekanan, atau partisipasi tiranik akibat desakan atau paksaan dari unsur birokrasi kelurahan.

b. Masyarakat sebagai Subyek Pembangunan yang Aktif

Pergeseran paradigma pembangunan dari top down planning ke bottom up planning telah menimbulkan konsekuensi logis terhadap berubahnya pula paradigma perencanaan pembangunan di tingkat lokal, yakni dari membangun masyarakat menjadi masyarakat membangun. Paradigma membangun masyarakat adalah paradigma masa lalu yang memosisikan masyarakat sebagai obyek pembangunan atau masyarakat tidak sebagai aktor kunci pembangunan. Residu dari paradigma ini telah secara nyata memandulkan peran masyarakat untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut masa depannya sendiri. Sementara paradigma kedua adalah paradigma yang memosisikan masyarakat sebagai aktor kunci dalam pembangunan. Keseluruhan proses-proses pembangunan

partisipatif diinisiasi, dilaksanakan, dikendalikan, dievaluasi, dimanfaatkan dan dilestarikan hasil-hasil programnya.

Masyarakat sebagai subyek telah menjelma menjadi tema sentral dalam banyak perbincangan publik. Konsepsi subyek tak pelak melahirkan pandangan mutakhir bahwa subyek berarti sebagai sesuatu yang utama dan merupakan modalitas yang sama kedudukannya dengan konsep pemberdayaan itu sendiri. Predikat sebagai subyek memiliki pengaruh kuat dalam membangun sebuah sistem baku serta produktif untuk mengakomodir masyarakat sebagai pelaku kunci pembangunan. Analisis yang dilakukan terhadap semua temuan penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat mendapatkan momentum tersebut dengan mempresentasikan dirinya sebagai eksekutor yang dapat diandalkan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara lebih bermartabat.

Sejumlah penelitian yang membahas isu ini menginformasikan bahwa penerapan paradigma pemberdayaan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat terekspresikan dari seluruh tahapan atau proses-prosesnya. Penelitian Maindoka (2004), Septiningsih (2009), dan Lusida (2020) secara eksplisit menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan terimplementasi dengan didasarkan pada paradigma pemberdayaan yang memberi masyarakat hak penuh untuk berproses secara mandiri. Masyarakat sebagai subyek pembangunan memberi makna tentang otoritas pembangunan di level masyarakat ada pada prakarsa masyarakat sendiri. Pentahbisan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang kompetitif menegaskan bahwa masyarakat mendapatkan kepercayaan untuk menjadi mitra produktif bagi pemerintah daerah dalam melakukan upaya pembangunan di tingkat akar rumput.

Pergeseran lebih lanjut yang dapat diinterpretasi sekaitan dengan pemosisian masyarakat sebagai subyek adalah pergeseran

paradigma pembangunan berbasis kebutuhan menjadi pembangunan berbasis potensi. Pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini KOTAKU telah menjadi pioner dalam menggeser paradigma tersebut dimana penyelesaian persoalan di tingkat warga direncanakan atas dasar potensi yang dimilikinya, tidak berdasar kebutuhannya.

c. Kewenangan dalam Pengambilan Keputusan

Salah satu komponen dan intervensi program KOTAKU adalah memfasilitasi pembentukan kelembagaan Organisasi Masyarakat Warga (OMW) sebagai wadah belajar bagi warga dalam menghimpun kekuatan dan potensinya untuk memecahkan persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan isu kerentanan lainnya. Proses pembentukan lembaga berlangsung secara demokratis dengan memberi otoritas sepenuhnya bagi warga untuk mengambil keputusan menyangkut mekanisme pemilihan, kriteria pengurus, dan penjaminan akses yang setara bagi semua warga untuk berkompetisi secara sehat dan fair. Prinsip ini mendukung secara tegas perihal pentingnya memberikan warga kewenangan yang berhubungkait dengan pengambilan keputusan tentang siapa yang memenuhi kriteria untuk mengendalikan LKM terbut.

Dengan predikatnya sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan program, maka masyarakat mendapatkan otoritasnya dalam menentukan usulan kegiatan prioritas melalui mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan permufakatan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui rembug warga di tingkat kelurahan sebagai forum tertinggi warga dalam pengambilan keputusan terhadap semua usulan kegiatan yang disepakati secara bersama-sama. Fasilitator program dan birokrasi kelurahan berperan sebagai fasilitator yang memberi dukungan terhadap proses penguatan demokrasi masyarakat melalui proses pengambilan keputusan yang berkonsekuensi baik terhadap kehidupan

masyarakat secara keseluruhan.

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada keyakinan bahwa masyarakat mampu berproses menuju mandiri telah memberi arah baru bagi perjalanan demokrasi masyarakat. Kewenangan dan mandat dalam pengambilan keputusan yang diaktori oleh masyarakat, secara substansial telah memproklamkan sebuah model demokrasi komunitas yang mengedepankan nilai kolektivisme dan relasi multipolar yang produktif antara masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya.

Pengambilan keputusan sejatinya melingkupi keseluruhan proses-proses program yang dimulai dari identifikasi masalah, prioritas usulan kegiatan, besaran anggaran yang dibutuhkan, mekanisme pengelolaan kegiatan, pembentukan organisasi pemelihara dan perumusan aturan main dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan program, hingga pada fase terminasi secara keseluruhannya melibatkan proses pengambilan keputusan. Ringkasnya bahwa program telah mendorong dan menjadikan masyarakat sebagai entitas pengambil keputusan yang terpercaya dan dapat diandalkan.

d. Isu Gender dan Pelibatan Perempuan

Dikotomi laki-laki dan perempuan tak pelak telah memicu munculnya diskursus tentang pola relasi ideal antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sejatinya melulu dipersepsikan sebagai figur yang memiliki kekuasaan di *public sector*, sementara perempuan identik dengan *domestic sector*. Kemapanan pandangan ini dicoba didistorsi dalam dunia pemberdayaan masyarakat yang dikonstruksi di atas idiom kesetaraan dan kesamaan posisi dan peran. Dewasa ini, isu gender masih tampak sebagai isu sengit yang menjadi materi debat dalam berbagai bentuk ruang. Gender dalam pemberdayaan masyarakat adalah konsep dan perjuangan menuju relasi seimbang dan tidak saling menghegemoni antara laki-laki dan perempuan.

Temuan penelitian menunjukkan adanya keadilan gender bagi perempuan yang dipertegas dengan sejumlah bukti kokret tentang peran kualitatif dan signifikan perempuan dalam implementasi program. Kiprah perempuan dalam program KOTAKU adalah dedikasi yang harus diberikan respek dan apresiasi. Keikutsertaannya dalam berbagai peran tidak melawan kodrat, melainkan melawan diskriminasi. Meskipun tatanan sosial masyarakat lokasi penelitian masih bercorak patriarkhi, namun isu gender tetap menjadi perhatian penting fasilitator dalam mengedukasi warga perempuan untuk berkiprah lebih signifikan dalam program. Determinasi kelompok laki-laki tentu masih sulit dibendung, tetapi upaya untuk memberi penguatan bagi warga perempuan agar berkontribusi secara nyata dalam program juga senantiasa diupayakan oleh fasilitator. Perubahan sosial yang dinamis telah menyebabkan perubahan pada tatanan relasi yang lebih seimbang dan berdampak secara nyata pada makin membaiknya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Sikap egaliter dan inklusif masyarakat yang memberikan akses bagi perempuan untuk terlibat dalam program dimaknai sebagai modal budaya yang positif (Hale, Irish, dkk, 2023).

Keterlibatan perempuan tidak saja dilihat dari partisipasinya pada rangkaian tahapan program yang diikutinya, tetapi juga mengambil peran yang lebih utama sebagai pengurus LKM. Data menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) pengurus LKM, 4 (empat) diantaranya adalah perempuan. Penelitian Mandjarreki dan Fadly (2023) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi perempuan pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan, tidak saja dilihat dari aspek kuantitas mereka yang terlibat tetapi juga dilihat dari bentuk peran yang dilakukannya selama pelaksanaan program.

Program KOTAKU secara eksplisit mengadopsi dan menjabarkan secara konkret

paradigma pemberdayaan mutakhir dengan memberi kewenangan, porsi, dan peran signifikan bagi masyarakat selama proses implementasi program.

D. KESIMPULAN

Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Pangkajene berjalan dengan baik dan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip dalam pendekatan *bottom up planning*. Masyarakat sebagai pemanfaat primer memiliki akses yang setara dan peluang untuk menjadi bagian penting dari program. Berbagai kontribusi dan peran ditunjukkan masyarakat memberi bukti otentik bahwa masyarakat memberikan dukungan yang baik terhadap penyelenggaraan program. Dedikasi fasilitator sebagai pendamping masyarakat telah mampu menjadi katalisator dan mediator yang mendorong program terlaksana secara inklusif dan demokratis.

Dukungan dari berbagai *stakeholder* pembangunan lokal telah berkontribusi dalam mengakselerasi keberhasilan program. Prinsip program yang inklusif, demokratis, dan transparan merupakan aspek utama yang menjadikan program ini memperoleh dukungan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiyansari. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi Kasus tentang Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Program Pusat Layanan). *Tesis pada Program Studi Ilmu Komunikasi PPs Universitas Gadjah Mada*.
- Bahua, Muhammad Ikbal. (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Ideas Pbulisihing, Gorontalo.
- D. Ghai, J.M. Vivian (Eds.). (2014). *Grassroots Environmental*

Action: People's Participation in Sustainable

Development, Routledge, London, UK.

- Fatimah, 2022. Pengembangan Desa Wisata Kamboeng Bamboe Berbasis Partisipasi di Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. *Jurnal Wasiah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Volume (2).

- Friedman, John. (1992). *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.

- Gaventa, John. (1980). *Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in an Appalachian Valley*. University of Illinois Press.

- Ife, Jim & Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Edisi Ketiga (Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid; alih bahasa). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- James Hale, Aiden Irish, Becca B.R. Jablonski Michael Carolan, Jill K. Clark, Shoshanah Inwood & Tom Johnson. (2023). A Systematic Review of Cultural Capital in U.S. Community Development Research. *Journal of Rural Studies* 103.

- Kempeneer, Shirley. 2021. A Big Data State of Mind: Epistemological Challenges to Accountability and Transparency in Data-Driven Regulation. *Journal and Books [Government Information Quarterly](#), Volume 38, Issue 3*, July 2021, 101578

- Kartasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES, Jakarta.

- Lusida, Nensy. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Agro-Ekowisata di Desa Politan Jomboran, Klaten. *Tesis pada Magister*

- Ilmu Admistrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.
- Maindoka, Anneke Grjese.(2004). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (CERD) di Kabupaten Minahasa. *Tesis* pada Magister Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi.
- Mandjarreki, Sakaruddin dan Fadly, Muhammad, 2023. Analisis Pengarusutamaan Gender pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan. *Jurnal Istqra* UIN Dato Karama, Vol (1).
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebiato. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Moleong, Lexy J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Jaya.
- Patton, Michael Quinn. (1978). *Utilization-Focused Evaluation*. Sage Publications.
- Priyono, Onny S. & Pranarka, A.M.W. (Penyunting). (1999). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies
- Putnam, Robert. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Sadan, Elisheva. 1997. *Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers.in Hebrew. [e-book].
- Septiningsih. (2009). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komunitas. *Skripsi* pada Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
- Sipahelut, Michel. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Tesis*. IPB. Bogor.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
-, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Smith, Marissa J, Katikireddi, Vittal , Hilton, Shona, dan Skivington, Kathryn. (2022). Development Processes for E-Cigarette Public Health Recommendations Lacked Transparency in Managing Conflicts of Interest. *Journal of Clinical Epidemiology* Volume 152, December 2022, Pages 80-88
- Sugiyanto, Mudiyo AY. Oelin Marliyantoro. (2017). *Dimensi-dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. APMD Press, Yogyakarta,.
- Sukmaniar. 2007. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. *Tesis*. UNDIP. Semarang.
- Sutaryono, 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati: Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*. Lappera Pustaka Utama dan STPN Press. Yogyakarta.
- Ullah, Ayat, Miroslava Bavorova, Ashfaq Ahmad Shah, Giri Prasad Kandel. (2023). Community Participation in Development programs: Key Lessons from the Billion Trees Afforestation Project (BTAP). *Journal Environmental Science & Policy, Volume 150*, December 2023, 103581.
- Wilson, Terry. 1996. *The Empowerment Manual*, London: Grower Publishing Company.
- Zanini, Marco Tulio Fundão, Carmen Pires Migueles, Cinara Gambirage dan Jaison Silva. 2003. Barriers to Local

Community Participation in Mining
Projects: The Eroding Role of Power
Imbalance and Information
Asymmetry. *Journal [Resources
Policy](#) Volume 86, Part B*, October
2023, 104283